

**NASKAH PUBLIKASI**

**ANALISIS GERAKAN #MeToo SEBAGAI PERLAWANAN KEKERASAN DAN  
PELECEHAN SEKSUAL BAGI PEREMPUAN DI CHINA**

***ANALYSIS OF THE #METOO MOVEMENT AS A RESPONSE TO SEXUAL  
VIOLENCE AND HARASSMENT FOR WOMEN IN CHINA***

Nazariana<sup>1</sup> Khoirul Amin<sup>2</sup>



**DISUSUN OLEH :**

**NAZARIANA**

**1811102434004**

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS EKONOMI, BISNIS DAN POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR**

**2022**

**Naskah Publikasi**

**Analisis Gerakan #MeToo Sebagai Perlawanan Kekerasan dan Pelecehan Seksual bagi  
Perempuan di China**

*Analysis of the #MeToo Movement as a Response to Sexual Violence and Harassment for  
Women in China*

Nazariana<sup>1</sup> Khoirul Amin<sup>2</sup>



**Disusun Oleh :**

**Nazariana**

**1811102434004**

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS EKONOMI, BISNIS DAN POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR**

**2022**



**LEMBAR PERSETUJUAN**

**NASKAH PUBLIKASI**

**ANALISIS GERAKAN #MeToo SEBAGAI PERLAWANAN  
KEKERASAN DAN PELECEHAN SEKSUAL BAGI PEREMPUAN DI  
CHINA**

*(Analysis of the #Metoo Movement As a Response to Sexual Violence and Harassment for  
Women in China)*

Diajukan oleh

Nazariana

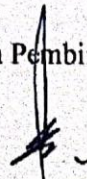
1811102434014

Telah disetujui oleh:

Dosen Pembimbing

Pada hari Senin, 04 Juli 2022

Dosen Pembimbing



Khoirul Amin, S.IP., M.A  
NIDN: 111511 9001



**LEMBAR PENGESAHAN**

**NASKAH PUBLIKASI**  
**ANALISIS GERAKAN #MeToo SEBAGAI PERLAWANAN**  
**KEKERASAN DAN PELECEHAN SEKSUAL BAGI PEREMPUAN DI**  
**CHINA**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

NAZARIANA  
1811102434004

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi dan dinyatakan  
**LULUS**

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana (S1)

Ilmu Hubungan Internasional

Pada hari, Senin, 04 Juli 2022

Di hadapan Dewan Penguji

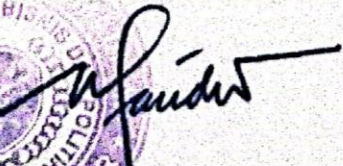
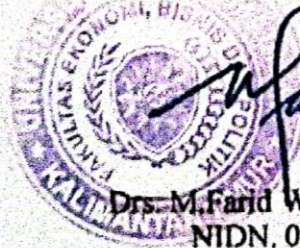
Dewan Penguji :

1. Khoirul Amin, S.IP., M.A

2. Mohammad Dziqie Aulia Al Farauqi, S.IP., M.A

()  
()

Mengetahui,  
**Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis dan Politik**

**Drs. M. Farid Wajdi, M.M., Ph.D**  
NIDN. 0605056501



# Analisis gerakan #MeToo sebagai perlawanan kekerasan dan pelecehan seksual bagi perempuan di China

**Nazariana**

*Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah*

*Kalimantan Timur, Samarinda*

[ana.daddario2you@gmail.com](mailto:ana.daddario2you@gmail.com)

**Abstrak.** Tulisan ini meneliti mengenai gerakan #MeToo yang telah memperluas percakapan tentang kekerasan seksual. Keberadaan #MeToo di dunia maya menyediakan ruang bagi wanita-wanita di seluruh dunia, tak terkecuali China, untuk berdiskusi dan berbagi informasi. Juga sebagai bentuk dari perlawanan mereka terhadap kekerasan/pelecehan seksual yang relevan dengan kehidupan dan pengalaman mereka, dan berfungsi sebagai batu loncatan untuk aktivisme siber ini terkait dengan isu-isu perempuan di China. Melalui *cyberspace*, aktivisme siber feminis memulai peranannya dan menghadirkan suara-suara perempuan dengan cara baru terhadap kekerasan seksual dan mengungkapkan kekuasaan di berbagai sektor masyarakat. Efek dari gerakan ini juga terlihat di sektor korporasi dan akademis. Sebelum #MeToo masuk di China, China tidak memiliki sistem hukum yang siap untuk menangani kejahatan penyerangan seksual, dan pelecehan seksual bahkan lebih sulit untuk dicegah dan dihukum karena ambiguitas undang-undang yang menentanginya. Setelah Gerakan #MeToo di China memobilisasi lembaga pemerintah dan LSM di kota, China saat ini sedang bekerja menuju kesetaraan, China juga akan mengamandemen Undang-Undang tentang Perlindungan Hak dan Kepentingan Perempuan, regulasi tersebut membuat kepentingan perempuan China semakin membaik, bahkan Dewan Negara, kabinet China, meluncurkan Outline of Women's Development in China (2021-30) untuk mempromosikan kesetaraan gender pada September 2021 hingga sekarang.

**Keywords:** Gerakan #MeToo, cyber feminisme, perempuan-perempuan di China.

**Abstract.** *This paper examines the #MeToo movement which has expanding the conversation about sexual violence. #MeToo's online presence provides a space for women all over the world, including China, to discuss and share information. Also as a form of their resistance to sexual violence/harassment that is relevant to their lives and experiences, and serves as a springboard for this cyber activism related to women's issues in China. Through cyberspace, feminist cyber activism begins its role and presents women's voices in new ways against sexual violence and expressing power in various sectors of society. The effects of this movement are also seen in the corporate and academic sectors. Before #MeToo occurred in China, China didn't have a legal system in place to deal with sexual assault crimes, and sexual harassment was even more difficult to prevent and punish because of the ambiguity of the laws against it. After the #MeToo Movement in China mobilizes government agencies and NGOs in the city. China is currently working towards equality, China also amended the Law on the Protection of Women's Rights and Interests, the regulation makes the interests of Chinese women increasingly better. China's protection of women's rights and interests has been improving, even The State Council, China's cabinet, unveiled the Outline of Women's Development in China (2021-30) to promote gender equality in September 2021 until now.*

**Keywords:** #MeToo movement, cyberfeminism, women in China.

## 1. PENDAHULUAN

Cyberfeminisme adalah nama yang diberikan untuk sebuah gerakan yang dibuat oleh berbagai kelompok perempuan (cyberfeminists) berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, sesuai dengan pandangan kritis para feminis, berdasarkan teori-teori antropologi sosial dan ilmu lain yang berkaitan dengan gender. Feminisme sendiri sebagai sebuah gerakan pembebasan kaum perempuan yang berupaya untuk melawan subordinasi terhadap perempuan telah menerapkan cara baru dalam menyuarakan isu-isu penting, dalam hal ini melalui aktivitas *cyber-feminism*. Menurut (Plant, 1996) cyberfeminisme adalah terminologi untuk mengidentifikasi gerakan perempuan melalui platform digital dari perkembangan teknologi. Pada akhir abad 20, teknologi mampu melahirkan realitas virtual dan *cyberspace*. Era ini menciptakan kondisi ruang dan waktu yang tiada batas. Teknologi virtual ini menggunakan teknologi komputer grafis yang mengkreasikan bentuk tiga dimensi. Salah satu inovasi teknologi ini adalah kemampuannya melahirkan profil manusia yang mampu mencangkok dirinya sendiri menjadi organisme lain, menterjemahkan dirinya sebagai tubuh yang mampu mendeskripsikan nilai-nilai sosial yang lain (Hamidah, 2019). Cyberfeminisme lahir dari penggunaan teknologi dan internet sebagai media komunikasi baru. Banyak organisasi-organisasi yang menciptakan gerakan yang bertujuan untuk menyeimbangkan hak perempuan yang selama ini ditindas, salah satu caranya ialah dengan memberdayakan *Cyberfeminism*.

Melalui *cyberspace*, aktivisme siber feminis memulai peranannya dan menghadirkan suara-suara perempuan dengan cara baru terhadap kekerasan seksual dan mengungkapkan kekuasaan di berbagai sektor masyarakat. Salah satu contoh dari sekian banyaknya gerakan aktivisme siber feminis yang lahir adalah *#MeToo movement*. Gerakan *#MeToo* merubah ketidakadilan yang terjadi kepada para penyintas pelecehan dan penyerangan seksual. Sejak lama orang-orang kaya yang memiliki kekuasaan menggunakan pengaruh mereka untuk membungkam korban-korban pelecehan seksual. Hal ini seperti yang terjadi pada tahun 2017 dimana seorang produser film bernama Harvey Weinstein, menggunakan *power* dan koneksi dalam industri perfileman yang ia miliki sebagai ancaman untuk membungkam para korban-korban yang dilecehkannya. Weinstein memerkosa perempuan koleganya, kru-kru film, serta aktris-aktris yang berada dibawah naungan industri filmnya (Serjerant, 2020). Gerakan *#MeToo* terlahir dari media sosial sebagai upaya dan sarana bagi para penyintas pelecehan seksual, penyerangan, dan pelecehan untuk berbagi cerita. Awalnya, gerakan ini didirikan pada tahun 2006, selanjutnya gerakan ini menjadi terkenal baik secara online maupun offline, dan mendapatkan perhatian yang signifikan pada akhir tahun 2017, ketika beberapa aktris membuka suara tentang pengalaman mereka dengan pelecehan seksual di industri film. Sejak saat itu, gerakan ini menjadi sumber solidaritas bagi perempuan dari semua latar belakang yang pernah mengalami pelecehan seksual, yang paling sering, meski tidak selalu, dilakukan oleh rekan laki-laki. Mayoritas cerita yang dibagikan sebagai bagian dari gerakan *#MeToo* ialah pria dan wanita yang merinci contoh pelecehan atau penyerangan seksual yang dilakukan terhadap mereka, sebagian besar oleh pria kaya dan berkuasa, yaitu orang-orang yang sebelumnya mengira mereka dapat melakukan tindakan ini tanpa hukuman. Dengan lahirnya gerakan *#MeToo*, pria dan wanita di seluruh negeri dan dunia memutuskan bahwa sudah saatnya perubahan terjadi. Para pelaku kejahatan seksual tidak bisa lagi bersembunyi di balik kekayaan dan kekuasaan mereka. Mereka

juga harus bertanggungjawab kepada dunia atas kejahatan mereka. Jika gerakan #MeToo ini tidak ada, sudah di pastikan bahwa tidak banyak pelaku kekerasan, pelecehan, ataupun penyerangan seksual akan terungkap. Hal ini berlaku bagi seluruh negara yang ada di dunia, termasuk China, yang akan menjadi negara yang akan diteliti dalam penelitian ini.

Satu contoh yang dapat kita lihat adalah aktivisme yang pertama kali memasuki kampus universitas, di mana perempuan mulai berbicara menentang kesalahan para profesor. Pada 1 Januari 2018, akademisi Tiongkok #MeToo dilanda skandal, yaitu terkait dengan tuduhan yang dipublikasikan di Weibo oleh mantan mahasiswa doktoral, Xixi Luo, yang menuduh mantan supervisor Chen melakukan pelecehan seksual terhadapnya dan beberapa mahasiswa lainnya di Universitas Beihang, sebuah universitas riset publik besar yang berlokasi di ibu kota Tiongkok (BBC News, 2018). Seperti kata pepatah, “Satu percikan api dapat memicu kebakaran besar,” dengan tagar “Wo Ye Shi” (“#MeToo” dalam bahasa Mandarin), mantan siswa lainnya juga muncul di media sosial Tiongkok dengan tuduhan terhadap mantan supervisor mereka. Misalnya, seorang mahasiswa di Universitas Peking di Beijing pada 1990-an melakukan bunuh diri setelah menuduh bahwa dia telah dilecehkan secara seksual dan diperkosa oleh Shen, seorang profesor terkenal di universitas tersebut. Terinspirasi oleh gerakan tersebut, teman-teman dan pendukungnya menyoroti peringatan kematiannya selama Festival Qingming (festival nasional untuk pembersihan kuburan). Tindakan mereka mendapat perhatian luas dan memicu kemarahan besar, yang memaksa Shen untuk mengundurkan diri. Jika sejak dahulu kasus seperti ini sudah pernah terjadi, tentu saja dampaknya tidak terlihat dan sangat terbatas, tetapi lain hal dengan yang terjadi pada 2018, situasinya telah berubah total. Secara umum, para aktivis percaya bahwa perempuan Tiongkok telah diberdayakan oleh gerakan global #MeToo untuk memperjuangkan hak mereka sendiri (Mu, 2018).

Dengan demikian, melihat dari bagaimana gerakan #MeToo ini bergerak di negara seperti China. Penulis ingin mendalami dan meneliti lebih lanjut hal-hal yang berkaitan dengan perempuan-perempuan di China serta bagaimana mereka melakukan perlawanan terhadap kekerasan seksual di bawah sistem yang non-demokrasi. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, dibandingkan dengan negara-negara yang demokratis, China memiliki caranya tersendiri dalam mencakup internet. Dengan demikian aktivisme siber China memunculkan praktik komunikasi yang berbeda untuk memfasilitasi ruang publik. Terlepas dari ketertutupan negara ini dari sistem pemerintahannya. Dunia maya China selama lambat laun telah memperluas batas ekspresi publik, debat publik, serta kritik eksplisit terhadap pemerintah. Maka dari itu, hal ini menarik untuk dipelajari lebih lanjut bagaimana perubahannya terhadap isu-isu seperti gerakan #MeToo.

## **2. LITERATURE REVIEW**

Meletusnya gerakan #MeToo menunjukkan bahwa permasalahan ini sangat krusial dan terus menjadi perbincangan yang selalu menarik untuk dibahas. Walaupun gelombang *movement* ini terbilang baru, tetapi gerakan ini mulai menarik banyak perhatian para penstudi hubungan internasional dan yang terkait.

Dengan demikian penulis mengambil enam penelitian terdahulu yang bertopik sama dengan tulisan yang akan diteliti dalam penelitian ini. Dalam tulisan (XiaoHan, 2021) yang berjudul *Uncovering The Low-Profile #MeToo Movement: Towards A Discursive Politics of Empowerment on Chinese Social Media*. Artikel ini mengusulkan kerangka teoritis yang memperhatikan pembuatan makna diskursif dan menggunakan gagasan pemberdayaan yang luas, disebut sebagai 'pemberdayaan melalui wacana', untuk menawarkan pemahaman yang lebih bernuansa tentang gerakan #MeToo dalam konteks Cina. Kerangka kerja ini digunakan untuk menganalisis kumpulan materi #MeToo yang muncul di media sosial Tiongkok. Artikel ini menggabungkan analisis wacana postingan-postingan tersebut dan wawancara dengan feminis dari kolektif aktivis untuk mengkaji secara kritis pemberdayaan feminis dengan bercermin pada praktik penceritaan dan narasi penyintas/korban, kapasitas media digital untuk memfasilitasi dialog kritis antara saksi dan penyintas/korban serta peran pengorganisasian kolektif aktivis dalam membuka ruang untuk membaca, mendengarkan, dan menyembuhkan secara kolektif. Artikel ini tidak ditulis untuk menelusuri garis besar gerakan #MeToo versi Tiongkok, tetapi untuk bergulat dengan warisan politik pemberdayaan diskursif yang dapat menghasilkan perubahan sosial-politik melalui penggunaan media sosial Tiongkok dengan penuh perhatian dan kreativitas. Dengan cara ini, mungkin gerakan #MeToo low-profile dalam konteks Cina berfungsi sebagai titik awal bagi para peneliti dan aktivis feminis digital untuk memerhatikan wacana yang memberi ruang bagi ketahanan politik pemberdayaan dengan mengalihkan perhatian ilmiah mereka. jauh dari sensor. Studi tersebut menunjukkan sifat diskursif politik feminis yang terjadi dalam bentuk-bentuk baru penceritaan dan dialog melalui narasi, komentar dan solidaritas dan memperluas dukungan pada penelitian yang ada yang menata kembali potensi radikal media digital untuk pemberdayaan feminis di Tiongkok dan sekitarnya dengan pengertian kritis dari wacana.

Tulisan kedua yaitu jurnal artikel yang berjudul *#MeToo as Connective Action: A Study of the Anti-Sexual Violence and Anti-Sexual Harassment Campaign on Chinese Social Media in 2018* oleh (Zeng, 2020). Menurut Zeng, gerakan #MeToo di China muncul, beradaptasi, dan tumbuh dalam konteks otoriter telah mengungkapkan wawasan tentang bagaimana tindakan penghubung melintasi berbagai platform dan konteks budaya. Studi Zeng ini menggunakan teori tindakan penghubung untuk menyelidiki bagaimana teknologi digital mengubah cara aktivisme feminis berlangsung. Analisis kuantitatif dan kualitatif digunakan untuk menganalisis secara sistematis lebih dari 36.000 artikel online yang terkait dengan kampanye. Studi ini mengidentifikasi 48 kasus tuduhan kekerasan dan pelecehan seksual. Temuan dari analisis tersebut menunjukkan bahwa kampanye #MeToo China pertama kali muncul di lembaga pendidikan sebelum secara bertahap menyebar ke sektor masyarakat lainnya. Berdasarkan penelitian tersebut, beberapa hal teridentifikasi yaitu serangkaian strategi kontra-sensor. Secara metodologis, penelitian ini menunjukkan bagaimana metode campuran dapat digunakan untuk mempelajari tindakan penghubung di media sosial di China. Tulisan ini memberikan wawasan tentang gerakan #MeToo yang tumbuh di dalam negeri China, dengan penekanan khusus pada konteks teknologi dan geopolitik negara tersebut. Menggunakan *connective actions logic*, dengan fokus pada bagaimana teknologi digital mengubah cara aktivisme feminis terjadi sebagai aktor pengorganisasian, bukan sebagai alat instrumental belaka. Memanfaatkan hasil dari analisis kualitatif



dan kuantitatif dari platform WeChat dan laporan media, penelitian ini menggambarkan bagaimana #MeToo muncul di lembaga pendidikan tinggi China, dan secara bertahap berkembang ke industri media, masyarakat sipil, dan sektor bisnis. Studi ini juga menjelaskan bagaimana penyensoran online dihindarkan oleh pendukung #MeToo di China. Seperti banyak kampanye online lainnya, #MeToo mengalami sensor online yang ketat. Namun, tanggapan netizen berikutnya menunjukkan aspek penting dari tindakan penghubung di lingkungan digital Tiongkok. Temuan kualitatif menunjukkan strategi kontra-sensor kreatif yang digunakan selama kampanye untuk mengedarkan materi sensitif. Hal ini termasuk penggunaan teknologi blockchain, modifikasi gambar, dan bahasa kode dengan permainan kata-kata yang menyenangkan. Meskipun strategi media sosial pendukung #MeToo menggemakan taktik pembangkang internet Tiongkok sebelumnya, penelitian ini menunjukkan bahwa hambatan teknologi menjadi menantang baik bagi sensor maupun aktivis.

Tulisan lain yang juga menyoroti #MeToo *movement* khususnya terkait tagar yang digunakan ialah jurnal artikel milik (Xiong, Y., Cho, M., & Boatwright, B., 2019) yang berjudul *Hashtag Activism and Message Frames Among Social Movement Organizations: Semantic Network Analysis and Thematic Analysis Of Twitter During The #Metoo Movement*. Dalam penelitian tersebut penulis menganalisis perkembangan yang terjadi selama gerakan #MeToo berlangsung, organisasi gerakan sosial (Social Movement Organization) memainkan peranan penting dalam mobilisasi online dengan memanfaatkan berbagai bingkai pesan dan tagar yang menarik selama gerakan sosial berlangsung. Menerapkan pendekatan *co-creations* dan menggunakan framing sebagai kerangka teoritis, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana SMO menggunakan kata-kata dan tagar untuk berpartisipasi dalam gerakan #MeToo melalui Twitter. Berdasarkan kedua analisis jaringan semantik dan metode analisis tematik, temuan studi meningkatkan literatur organisasi gerakan sosial dan aktivisme serta memberikan implikasi praktis untuk kampanye gerakan sosial yang efektif. Studi ini mengkaji bagaimana SMO (Social Movement Organization) menyikapi aktivisme feminis, bagaimana tagar digunakan dalam gerakan dan mengkaji hubungan ulang antara jumlah tagar dan retweet. Hasilnya menyajikan jaringan yang berpusat pada feminisme dan aktivisme.

Lebih lanjut, tinjauan pustaka lainnya yaitu tulisan milik (Lin, Zhongxuan & Yang, Liu, 2019) dengan judul *Individual and Collective Empowerment: Women's Voices In The #MeToo Movement In China*. Tulisan ini meneliti keterlibatan perempuan di tingkat individu dan kolektif untuk menyelidiki bagaimana gerakan #MeToo global dapat meningkatkan pemberdayaan perempuan Tiongkok. Penelitian ini mengeksplorasi saling ketergantungan kompleks yang muncul antara dimensi keterlibatan individu dan kolektif dan cara-cara di mana proses pemberdayaan yang telah menghasilkan keluaran positif. Fokus pada dinamika yang mendasari interaksi antara tingkat individu dan kolektif yang mendorong proses pemberdayaan, memberikan pemahaman yang lebih bernuansa tentang kompleksitas pemberdayaan dalam gerakan #MeToo China. Yang pertama dan terpenting, hal ini telah meningkatkan kesadaran tentang perempuan Tiongkok yang melakukan tindakan anti-pelecehan seksual, dan itu juga dapat membantu mereka belajar memahami apa yang terjadi ketika mereka dilecehkan secara seksual. Mereka sekarang dapat memulihkan

diri dengan merekonstruksi identitas mereka di tingkat individu, dan terhubung satu sama lain dengan mendukung korban lain yang memiliki pengalaman serupa melalui media sosial. Beberapa bahkan menjadi termotivasi untuk berkumpul secara offline untuk mengambil tindakan. Akhirnya, mereka telah diberdayakan untuk menantang sistem kekuasaan di tingkat kolektif. Melalui proses ini, kesadaran dan agensi perempuan dibangkitkan melalui aksi perlawanan individu dan kolektif, seperti belajar, memahami, dan diberdayakan. Menurut data opini publik tentang gerakan #MeToo yang dirilis oleh Initium (grup media independen dari Hong Kong), orang-orang pada awalnya memperhatikan masalah ini, tetapi perhatian mereka dengan cepat memudar dan hanya beberapa orang yang terus memperhatikannya dalam jangka panjang. Oleh karena itu, undang-undang khusus sebagai semacam mekanisme kelembagaan sangat dibutuhkan untuk mencegah perilaku seksual yang tidak pantas di China.

Adapula artikel jurnal milik (Keremoğlu, E., & Weidmann, N. B., 2020) dengan judul *How Dictators Control the Internet: A Review Essay*, merupakan identifikasi survey literature yang mempelajari mengenai campur tangan pemerintah dalam komunikasi digital dan infrastruktur di negara dengan rezim otoriter. Pemerintah mengontrol di mana dan kapan teknologi komunikasi (TIK) diperkenalkan pertama kali, siapa yang mendapatkan akses ke sana, dan informasi apa yang dikomunikasikan. Pengaruh ini terjadi karena motif politik, biasanya untuk melarang aktivis oposisi dalam memobilisasi pengikut mereka secara online, untuk menahan penyebaran informasi yang kritis terhadap rezim, atau untuk memata-matai penduduk untuk mengidentifikasi potensi perlawanan. Fakta bahwa kediktatoran ikut campur dalam komunikasi tidak mengherankan juga bukan subjek studi baru dalam ilmu politik. Bahkan beberapa karya klasik tentang pemerintahan otoriter telah menekankan pentingnya otoriter untuk mengontrol arus informasi publik dan pribadi. Di era digital, tentunya hal ini menjadi tantangan yang lebih besar, tetapi pada saat yang sama merupakan kesempatan yang luar biasa bagi para otoriter. Perkembangan teknologi telah sangat memperluas kompleksitas, jangkauan, dan bandwidth komunikasi, yang membutuhkan tingkat kecanggihan teknis yang lebih tinggi untuk intervensi pemerintah. Penelitian ini berfokus pada lapisan jaringan berbeda yang dapat digunakan untuk interferensi, terdapat tiga lapisan kunci dari internet yaitu; lapisan infrastruktur, yang mencakup perangkat keras dan kabel untuk membangun dan memelihara koneksi; lapisan jaringan, yang memastikan bahwa data yang akan dirutekan tertuju pada sumber yang tepat, dan lapisan aplikasi yang terdiri dari perangkat lunak yang memungkinkan pengguna mengirim dan menerima informasi melalui jaringan.

Literature review terakhir yang juga membahas mengenai karakteristik pola pergerakan sosial di negara non-demokrasi adalah tulisan yang berjudul "Social Movements In Abeyance In Non-Democracies: The Women's Movement In Franco's Spain" (Valiente, 2015). Valiente memaparkan bahwa gerakan sosial mengalami periode aktivitas yang intens dan periode penundaan ketika aksi kolektif sangat lemah karena iklim politik yang tidak bersahabat. Non-demokrasi adalah kasus ekstrim dari lingkungan politik yang sangat bertolak belakang untuk gerakan sosial. Mengambil studi kasus gerakan perempuan di Franco Spanyol (pertengahan 1930an - 1975) berdasarkan analisis dokumen yang diterbitkan dan tujuh belas wawancara, artikel ini berpendapat bahwa beberapa non-demokrasi memaksa gerakan sosial yang ada sebelum



kediktatoran ke dalam periode menunda dan membentuk pengorganisasian kolektif dalam hal lokasi, tujuan, dan kegiatan. Beberapa gerakan sosial di bawah kekuasaan non-demokrasi yang berkepanjangan berhasil menghubungkan dan mentransmisikan tujuan, repertoar kegiatan, dan identitas kolektif aktivis pra-kediktatoran dengan aktivis pasca-kediktatoran. Hal ini terjadi terutama melalui aktivitas kultural. Diteliti melalui Konsep *abeyance*, tulisan ini memaparkan bahwa konsep tersebut secara mendalam menangkap hambatan yang dihadapi gerakan sosial ketika bertahan dalam lingkungan politik yang merugikan. Gagasan 'abeyance' ini awalnya diciptakan dari dan kemudian diterapkan pada studi tindakan kolektif dalam pemerintahan demokratis (atau semi-demokratis). Namun, seperti dalam kasus empiris pengorganisasian perempuan di Franco Spanyol menunjukkan, konsep abeyance dapat digunakan untuk memahami aktivisme sosial di rezim non-demokrasi. Dilihat dari perspektif lain, konsep abeyance menempatkan (potensi) kontinuitas aksi kolektif di antara gelombang mobilisasi di non-demokrasi tepatnya pada pusat penyelidikan sosiologis. Secara umum, keilmuan tentang gerakan sosial di non-demokrasi belum cukup menganalisis kesinambungan gerakan karena kajian ini terutama mempelajari transisi menuju demokrasi, kebijakan dan protes. Beberapa otoritas sepenuhnya menghancurkan gerakan sosial yang aktif di masa pra-kediktatoran. Namun di lain hal, rezim non-demokratis memaksa gerakan sosial ke fase penundaan dan sangat mempengaruhi gerakan sosial terkait dengan lokasi, tujuan, dan aktivitasnya.

Secara garis besar, dengan dipaparkannya beberapa tinjauan pustaka di atas, penulis ingin memberikan fokus kepada bagaimana mobilisasi dari gerakan #MeToo berjalan di balik sistem pemerintahan China, serta apa saja tantangan dan perubahan/dampak yang didapatkan. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang lebih menyoroti analisis kumpulan materi #MeToo yang muncul di media sosial China, penelitian ini tidak hanya membahas itu saja, tetapi juga membahas berbagai macam *gender based violence* yang dihadapi oleh perempuan-perempuan di China, yang pada akhirnya akan berkaitan kepada penerimaan kemunculan #MeToo movement di negara China.

### **3. CYBERFEMINISME DAN NETWORK SOCIETY THEORY**

Sadie Plant (1996) menggunakan istilah cyberfeminisme untuk menunjukkan adanya "aliansi" dan "hubungan" antara perempuan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, di mana "perempuan selalu menjadi bagian-bagian dari mesin dan teknologi untuk mempertahankan budaya laki-laki". Cyberfeminisme juga menjadi medan perjuangan para feminis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi kepada kehidupan perempuan. Ada kondisi yang membahayakan dari pengertian konsep gender sebagai akibat dari perubahan budaya teknologi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. *The Cyberfeminist Internasional* telah berusaha untuk menyatukan perempuan dari berbagai bidang pengetahuan dan minat di seluruh dunia dalam komunikasi elektronik dan membangun jaringan. Hal ini ditujukan untuk bekerja sama dalam memperkuat keterlibatan dan akses perempuan dalam membuat kebijakan. Sebagai akibat dari pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, para cyberfeminist harus secara radikal memperluas kritik mereka tentang dampak perkembangan multimedia bahkan hypermedia serta berbagai teknologi dunia, terhadap masalah

ketidaksetaraan gender yang belum terselesaikan. Para cyberfeminist memiliki kesempatan untuk membuat formasi baru baik secara teoritik maupun praktek sesuai dengan konsep feminisme. Karna sebetulnya feminis sudah cukup untuk cyberfeminisme, di sana telah mengandung konsep gender itu sendiri, bedanya adalah dengan adanya cyberfeminisme, konsep feminis berkembang agar dapat bersaing dengan kondisi realita sosial dan kehidupan sehingga dampak dari perkembangan teknologi dan komunikasi ini membantu para perempuan-perempuan dalam mewujudkan cita-cita mereka bersama. Dalam hal ini, sangat penting untuk mengatasi masalah ketidaksetaraan gender, berkaitan dengan perubahan kondisi sosial yang diciptakan oleh teknologi informasi (Mulyaningrum, 2015).

Pada hakikat awalnya cyberfeminisme ingin merubah situasi di mana ada perbedaan daya antara perempuan dan laki-laki dalam wacana digital, dengan adanya wacana tersebut media elektronik dapat dipergunakan untuk mendorong partisipasi perempuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terbaru memiliki kekuatan yang mampu membuat perubahan di bidang sosial, budaya, dan ekonomi bagi perempuan di seluruh dunia. Kaitan antara dunia maya/cyber dan feminisme disini berarti terdapat gerakan yang bertujuan untuk mengarahkan, mengontrol dan mengembangkan feminisme dalam konsep baru berkaitan dengan situasi politik, sosial, dan budaya yang baru dan signifikan. Maka dari itu indikator-indikator itulah yang dapat mewujudkan semangat para aktivis cyber ini dalam membawa perubahan pada perempuan-perempuan di negara Arab. Teknologi cyberspace ini telah membawa perubahan dalam cara bekerja para feminis. Mereka membangun karya secara online, kemudian berdialog, memotivasi orang lain, mendengarkan, berbagi, menangani konflik, semua dilakukan dengan pendekatan yang berbeda, lebih menyenangkan. Cyberfeminisme disajikan sebagai ruang di mana informasi digital dapat diakses secara bebas, dan ditransmisikan secara elektronik. Dunia maya, menurut pandangan cyberfeminists, telah membuka kemungkinan baru dan membebaskan perempuan dari kekerasan tradisional yang mereka alami sebelumnya dalam banyak aspek seperti dalam wacana agama, intelektual, teoritis, dan filosofis. Para cyberfeminist merasa bahwa teknologi informasi dan komunikasi sebagai e-media yang baru bagi perempuan. Melalui e-media mereka juga dapat mendesain ulang dari program-program yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan perempuan. Berbagai variasi dalam dunia maya juga menjadi sarana untuk mengubah kondisi femininitas sebagaimana yang dimaksudkan dari konsep cyberfeminisme, yaitu menghilangkan ketidaksetaraan gender.

Teori kedua ialah Masyarakat Jaringan atau *Network Society*, yaitu sebuah pemahaman atau konsep yang digagas oleh Manuel Castells dalam bukunya yang berjudul "The Information Age". *Network society* menggambarkan aktivitas komunikasi masyarakat melalui teknologi informasi dan komunikasi. Fenomena *Network society* secara bertahap dikenal melalui gagasan McLuhan melalui konsep *global village electronic age*-nya (McLuhan, 2003). Aktivitas komunikasi dalam konteks *Network Society* ini dapat terjadi melalui fasilitas internet dan didukung oleh teknologi informasi itu sendiri. Maka dengan demikian masyarakat dapat menggunakan dan memanfaatkan informasi tersebut untuk kepentingan dalam bidang ekonomi, politik, dan aktivitas sosial lainnya. Masyarakat jaringan merupakan sekumpulan masyarakat yang terhubung dengan masyarakat yang lainnya dan dipertemukan atas kepentingan yang sama. Website, aplikasi, dan platform



media sosial yang beragam merupakan bentuk dari instrumen yang memudahkan masyarakat di seluruh dunia dalam berjejaring sosial, komunitas online pun dapat ditemui dengan mudah dalam berkomunikasi melalui *cyberspace*, seperti chat, messenger, blog, diskusi grup, dll untuk mencapai kepentingan bersama itu tadi. Dalam Masyarakat jaringan, Castells mengemukakan kembali tentang perbedaan antara 'space of places' dan the 'space of flows', untuk penekannya dalam masyarakat jaringan. Dengan informasi mengalir menjadi pusat organisasi masyarakat hari ini, tempat-tempat yang berbeda dan jauh dapat menjadi 'terintegrasi dalam jaringan internasional yang menghubungkan sektor paling dinamis.

Para perempuan dalam komunitas online (cyberfeminism) ini dapat disebut sebagai masyarakat jaringan, di mana sebuah masyarakat yang struktur sosialnya terbuat dari jaringan yang didukung oleh informasi berbasis komunikasi-teknologi. Dengan struktur sosial, para perempuan ini memahami pengaturan organisasi manusia dalam hubungan produksi, konsumsi, reproduksi, pengalaman, dan kekuatan yang dinyatakan dalam komunikasi kode budaya. Teknologi membantu perempuan dari keterbelakangan, percepatan pengolahan data informasi, efisiensi tenaga dan waktu dalam mengatasi pekerjaan domestiknya (Castells, 2004). Perempuan juga sebagai bagian dari masyarakat digital, mempunyai hak sebagai pencipta dan pengguna dari teknologi informasi dan komunikasi cyberfeminist itu tadi, dengan tujuan yang diinginkan adalah untuk mendapatkan kesempatan bagi para perempuan agar dapat terhubung satu sama lain. Peningkatan jumlah pengguna internet di kalangan perempuan berarti telah mempersempit kesenjangan gender pada teknologi informasi dan cyberspace. Oleh karena itu, para perempuan-perempuan ini sebagai bagian dari masyarakat jaringan melalui jembatan *cyberfeminism* diharapkan mampu mengubah ketidaksetaraan gender tersebut agar perempuan mampu mengoptimalkan potensi mereka.

#### **4. EMPIRICAL RESULTS AND DISCUSSION**

##### **4.1 Asal Usul Gerakan #MeToo**

Gerakan #MeToo pertama kali dicetuskan oleh Tarana Burke, seorang aktivis yang berasal dari Amerika Serikat, gerakan ini ditujukan untuk mengakui pengalaman penyerangan dan pelecehan seksual, terutama oleh perempuan kulit berwarna di komunitas berpenghasilan rendah. Gerakan ini mendorong perempuan untuk berbicara tentang pengalaman kekerasan dan pelecehan seksual mereka, serta berusaha untuk meminta pertanggungjawaban pelaku atas tindakan tersebut dan memberikan dukungan kepada para penyintas. Gerakan #MeToo mendapatkan lebih banyak daya tarik dan publisitas setelah Harvey Weinstein terungkap melakukan pelecehan seksual kepada sejumlah aktris, terhitung dari tahun 2017 hingga saat ini. Gerakan ini telah menginspirasi banyak penyintas pelecehan untuk menyuarakan cerita mereka. Para penyintas menemukan solidaritas dalam berbagi pengalaman mereka dan, dalam beberapa kasus, mengejar tindakan hukum untuk meminta pertanggungjawaban pelaku pelecehan. Gerakan #MeToo telah berdampak pada orang-orang di Hollywood dan sekitarnya – termasuk klien dan terapis mereka, disaat perempuan-perempuan ini bergulat dengan langkah selanjutnya yang harus diambil sehubungan dengan pelecehan dan pelecehan seksual yang dialami di tempat kerja dan di luar lingkungan kerja (Murphy, 2019). Pada 15 Oktober 2017, tagar #MeToo, digunakan di Twitter oleh aktor bernama Alyssa Milano, 'sebagai

tanggapan atas tuduhan penyerangan seksual oleh produser Hollywood Harvey Weinstein' untuk mendorong perempuan berbicara tentang kekerasan seksual. Jika semua wanita yang telah dilecehkan atau diserang secara seksual menulis 'Saya juga' (MeToo) sebagai status, ini dapat memberikan gambaran kepada orang-orang tentang betapa besar dan seriusnya masalah ini. Akhirnya, tagar tersebut digunakan setengah juta kali dalam 24 jam pertama kemunculannya. Meskipun #MeToo berpusat pada pengalaman sebagian besar wanita di Amerika Serikat, pada akhir November 2017, ada 'pembicaraan tentang “revolusi sosial” dengan lebih dari 1,7 juta wanita dan pria telah menggunakan tagar di 85 negara, dengan demikian menunjukkan bahwa serangan dan pelecehan seksual tidak terbatas pada Hollywood, tetapi merupakan fenomena di seluruh dunia (Bhattacharyya, R. 2018) dengan penggunaan tagar #MeToo yang menyebar ke Inggris, Kanada, Australia, Israel, India, China dan sekitarnya.

Digambarkan sebagai bentuk peningkatan kesadaran kontemporer yang menjadi ciri kampanye feminis selama tahun 1960an dan 1970an, #MeToo telah menjadi seruan gerakan perempuan yang secara terbuka menggambarkan pengalaman mereka di dunia maya. Dengan demikian, #MeToo adalah bagian dari fenomena yang disebut 'aktivisme feminis digital' atau 'hashtag feminism cyber' (Mendes, K., Ringrose, R. and Keller, J. 2018) yang menggunakan media sosial untuk menghasilkan komunitas percakapan di antara pengguna Twitter yang berbeda untuk melakukan perubahan sosial. Memang benar bahwa salah satu asumsi terdalam dari gerakan #MeToo adalah bahwa masyarakat kita tidak memberi kita pilihan nyata untuk keadilan. Sebagai reaksi budaya terhadap rezim hukum yang agak tidak memadai yang aturan, proses, dan prosedur pembuktiannya dalam persidangan pemerkosaan masih didasarkan pada 'stereotip kuno' tentang perempuan yang tidak suci, gerakan tersebut telah mengguncang beberapa orang paling berpengaruh di dunia hiburan dan politik, termasuk produser film, aktor pemenang penghargaan Academy, anggota parlemen Inggris, dan anggota Kongres Amerika Serikat (Johnson, C. 2018). Sementara Harvey Weinstein dikeluarkan dari dewan perusahaan produksinya setelah tuduhan penyerangan seksual kepada berbagai aktor, dan beberapa aktor *A-list* pria kehilangan peran akting dan reputasi mereka, menurut Center for American Progress, pelecehan seksual kemungkinan besar terjadi dalam pekerjaan industri jasa berupah rendah yang didominasi oleh wanita, khususnya wanita kulit berwarna, dan industri dimana pria secara historis melebihi jumlah wanita (Cossins, 2020).

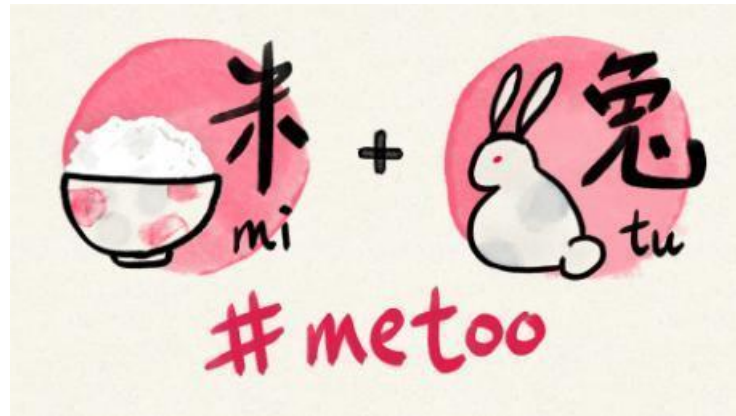
## 4.2 Gerakan #MeToo di China

Di China sendiri, penyebaran kisah di media digital tidak begitu mungkin untuk menyebar secara sukses mengingat sensor internet oleh pemerintah yang meluas di negara itu, #MeToo mengguncang universitas dan tempat kerja di China pada musim semi dan musim panas pada tahun 2018. Postingan pertama yang menjadi *key figure* wajah aksi #MeToo di China ialah Luo Xixi, mahasiswa yang menyebut profesor dari Universitas Beihang yang bergengsi, telah memaksanya untuk melakukan hubungan seksual di lingkungan kampus. Ia menuliskan surat terbuka di Weibo dan WeChat untuk pertama kalinya, yang setelah itu membangkitkan mahasiswa dan alumni dari lebih dari tujuh puluh sekolah China tergerak untuk mengedarkan templat petisi yang menuntut perlindungan lebih besar, tetapi dengan banyaknya konten yang



disensor dari postingan di Weibo (Twitter versi China, mereka mengganti tagar yang menyinggung dengan homofon lain seperti emoji untuk nasi dan kelinci yang diucapkan menjadi 'mi tu' dalam bahasa mandarin, untuk menghindari penghapusan dari sensor pemerintah.

**#RiceBunny, homofon sebagai penggantinya diucapkan "Mi tu,"**

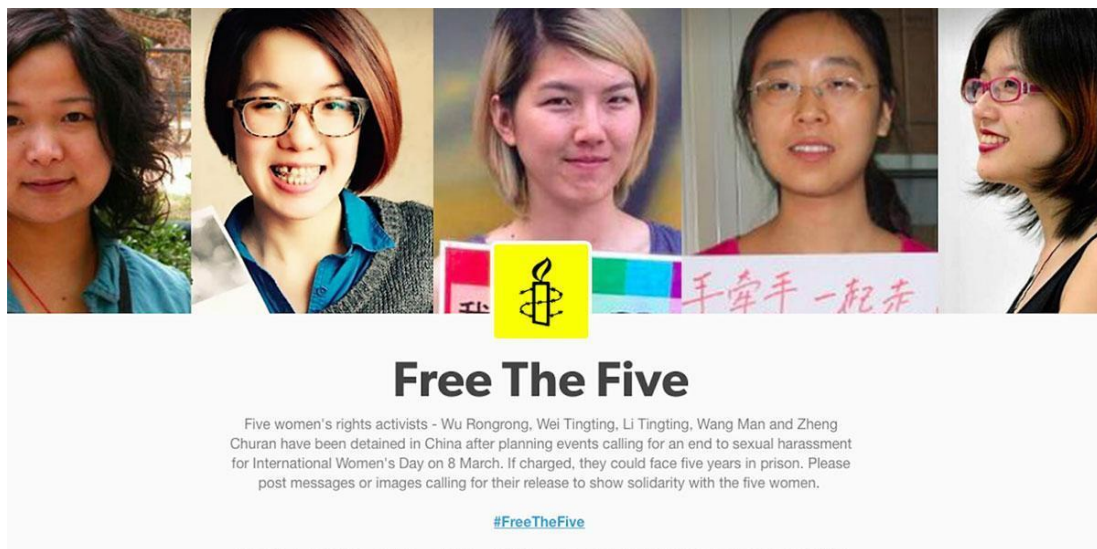


Momentum gerakan #MeToo mulai mencapai ke sektor lebih luas seperti sektor LSM, jurnalisme, komunitas agama, dan akhirnya politik, mempercepat tindakan keras oleh Partai Komunis Tiongkok (PKT) yang berkuasa. Munculnya #MeToo adalah satu babak lagi dalam gerakan perempuan Tiongkok yang ditandai dengan ketekunan dan kemampuan beradaptasi; salah satu yang telah ditarik pada link global dan menawarkan model untuk mengorganisir dalam keadaan yang tidak memungkinkan. Ruang politik dan sipil China yang tertutup membuat pengorganisasian feminis kontemporer berbahaya—beberapa wanita yang menceritakan pengalamannya ada pula yang ditangkap atau dipindahkan secara permanen di diaspora, bahkan pemain tenis papan atas Peng Shuai belum pernah terlihat di depan umum sejak Olimpiade Musim Dingin (Olimpiade Musim Dingin 2022 di Beijing membawa kemunculan kembali yang meragukan dari juara tenis Peng Shuai. Setahun sebelumnya, Peng secara terbuka menuduh mantan Wakil Perdana Menteri Tiongkok melakukan pelecehan seksual, lalu tiba-tiba menghilang dari pandangan publik, namanya diblokir dari pencarian online di situs web Tiongkok. Kekhawatiran dari atlet terkemuka seperti Serena Williams mengalihkan perhatian global ke gerakan #MeToo China). Meskipun gerakan #MeToo China sebagian besar telah dibungkam, keberadaannya memberikan hutang budi kepada para aktivis yang pemberani, pengacara pro bono, dan penasihat internal. Setiap kontribusi mereka dimungkinkan berkat pilihan strategis yang dibuat oleh generasi sebelumnya untuk memastikan kelangsungan hidup gerakan perempuan di masa-masa sulit karena kondisi pengorganisasian perempuan jauh di luar China. Dari Brasil, Mesir, Polandia, Turki, Rusia, hingga Amerika Serikat, otoritarianisme yang merayap berjalan beriringan dengan reaksi terhadap keuntungan feminis, dan sering kali menargetkan kekerasan terhadap aktor feminis itu sendiri. Di masa meningkatnya penindasan negara terhadap feminisme secara global, ada banyak yang bisa dipelajari dari perempuan China (Turkington, 2022).

#### **4.3 #MeToo Campaign Yang Menggerakkan Wanita-Wanita di China**

Di China, kampanye #MeToo menjadi tersebar secara meluas oleh aktivis feminist china yang dijuluki “The Feminist Five”. Salah satu anggotanya bernama Zhang Leilei, ia juga seorang aktivis untuk kesetaraan gender dan hak-hak LGBT-Q di China. Dia adalah bagian dari kelompok yang melakukan campaign dengan membagikan stiker dengan pesan anti pelecehan seksual pada Hari Perempuan Internasional. Sejak saat itu, Zhang terus mengerjakan sejumlah kampanye profil tinggi melawan pelecehan seksual, terutama upaya memasang papan iklan anti-pelecehan seksual di kereta bawah tanah di Guangzhou. Sementara media sosial di China menjadi semakin dikontrol dengan ketat, media sosial masih menyediakan platform skala besar yang dinamis untuk memperdebatkan isu-isu feminis dan mengorganisir sebuah kelompok, contoh paling kuat adalah gerakan #MeToo yang diprakarsai, disebarkan, dan diperluas media sosial tahun 2018. Di awal-awal gerakan, media arus utama takut angkat bicara, tapi setelah topik pelecehan seksual meledak di media sosial, mereka mulai satu per satu untuk meliput isu tersebut. Gerakan #MeToo di China selalu menjadi subyek investigasi resmi dan postingan terkait di media sosial sering kali dihapus, tetapi pada puncaknya, gangguan tersebut tidak cukup untuk mencegah gerakan tersebut lepas landas (Gathecole, 2019).

#### “The Feminist Five” in China



Gerakan anti-pelecehan seksual di China telah meletakkan banyak dasar bagi gerakan #MeToo 2018. Sebelumnya, insiden tertentu menjadi pendorong diskusi seputar pelecehan seksual. Ada kampanye “I can be slutty, but you cannot harras me” pada tahun 2012, dan kemudian kampanye *Human Billboard* tahun 2017, ketika penolakan pemerintah kota Guangzhou untuk mengizinkan aktivis membeli ruang iklan di kereta bawah tanah kota, 'papan reklame' yang dapat dipakai yang akhirnya digunakan oleh kelompok feminis di seluruh China. Ada juga insiden Wu Chunming tahun 2012 di Universitas Xiamen, ketika Wu, mantan profesor di institusi itu dipecat karena melecehkan siswa secara seksual, tetapi kemudian ditemukan dipertahankan oleh universitas sebagai pustakawan. Antara tahun 2012 dan 2017 terjadi peningkatan yang sangat besar dalam kesadaran masyarakat akan pelecehan seksual, namun cakupan dan kesinambungan pembahasannya belum sampai pada titik yang bisa disebut sebagai gerakan anti pelecehan seksual. Pada bulan-bulan menjelang ledakan #MeToo pada Juni 2018, mobilisasi besar-besaran pelajar dan perempuan-

perempuan di China mulai dilakukan, dimulai dengan kegiatan anti pelecehan seksual di sekolah dan perguruan tinggi. Mobilisasi ini pada gilirannya mempengaruhi perumusan kebijakan, meningkatkan kesadaran, dan membentuk komunitas luas dan landasan publik untuk gerakan #MeToo. Justru di atas landasan inilah pada Juni dan Juli 2018 gerakan besar-besaran menyebar ke ranah lain: sektor ketiga, media, agama, dan entertainment. Terutama semenjak tingkat pemahaman dan persetujuan publik meningkat, dan diskusi publik menjadi jauh lebih beragam.

Penggunaan media sosial oleh #MeToo juga telah membantu feminisme di China dengan memacu kesadaran kolektif yang berkembang tentang apa itu “feminisme”, karena semakin banyak orang di China yang memahami bahasa, konsep, dan energi gerakan tersebut. “#MeToo adalah bel alarm bagi kita semua,” kata Huang Xueqin, yang merupakan seorang jurnalis terkenal di China. Lu Manman, salah satu anggota *The Feminist Voices* (saluran paling penting untuk advokasi isu-isu perempuan di China, dan memiliki ratusan ribu pengikut di media sosial yang dicetuskan oleh Lü Pin, ia sejak dulu berpengalaman lebih dari dua puluh tahun mengadvokasi kesetaraan gender di China) mengatakan bahwa “terdapat lebih banyak keterbukaan tentang topik ini daripada sebelumnya, lebih banyak berita daripada sebelumnya, dan semakin banyak orang yang berani menceritakan pengalaman mereka di internet, dan gerakan ini juga cerdas dalam menyesuaikan presentasi identitas dan minat mereka”. Motivasi mahasiswa memerangi pelecehan seksual tidak bisa dengan mudah diabaikan. Lebih lanjut, mengidentifikasi diri mereka sebagai “pemuda yang teliti dan polos” juga memungkinkan mobilisasi populasi yang besar, bahkan melampaui batas-batas nasional—lebih dari 300 pelajar dan cendekiawan Tiongkok perantauan menandatangani petisi untuk mendukung advokasi lebih lanjut pada akhir Januari. Momentum tentang masalah ini di AS juga telah memberikan tingkat legitimasi pada upaya di China, meskipun tuntutan dan metodenya sedikit berbeda dalam konteks China. Kementerian Pendidikan dan beberapa universitas telah berjanji untuk membangun mekanisme untuk mencegah pelecehan seksual, gerakan #MeToo telah membuat kemajuan nyata menuju tujuannya, ini membuktikan bahwa adanya pencapaian yang benar-benar luar biasa dibalik #MeToo *movement* di China. Pada akhirnya, penghargaan atas keberhasilan ini harus dikaitkan dengan semakin populernya feminisme selama beberapa tahun terakhir dalam menanggapi aspirasi perempuan muda di China. Pemerintah Cina telah gagal untuk mencegah perempuan-perempuan dari percaya pada cita-cita feminis meskipun tindakan keras terus-menerus hadir terhadap aktivisme feminis dan kampanye untuk menstigmatisasi feminisme. Inti dari popularitas ini adalah komunitas tangguh dari feminis terorganisir yang siap untuk menyalurkan kemarahan yang meluas pada status perempuan yang tidak setara ke dalam perubahan sosial dan politik pada setiap kesempatan tertentu, seperti yang kita saksikan sekarang dengan gerakan #MeToo.

#### **4.4 Masalah Kekerasan dan Pelecehan Seksual di China**

Terinspirasi oleh banyaknya wanita yang melaporkan produser Hollywood Harvey Weinstein melakukan kekerasan seksual, penulis skenario Zhou Xiaoxuan adalah salah satu dari sedikit wanita yang berhasil membawa kasusnya ke pengadilan setelah mengajukan tuduhan pelanggaran di tangan salah satu dari mereka. Wajah yang paling dikenal di televisi Cina: pewawancara selebriti terkenal Zhu Jin. Kasus Zhou,

telah menyatukan feminis China untuk mendukung gerakan #MeToo yang masih baru di negara itu. Gerakan #MeToo China dimulai pada tahun 2018 ketika seorang mantan mahasiswa Universitas Beihang secara terbuka menuduh profesornya melakukan pelecehan seksual. Luo Xixi mempublikasikan tuduhnya secara online dan kemudian di platform media sosial Weibo, Twitter versi China, mengklaim bahwa dia adalah salah satu dari tujuh wanita yang dilecehkan oleh profesor. Akunnya, yang secara luas dianggap sebagai momen #MeToo viral pertama di China, membuat universitas tersebut menghapus kredensial mengajar para profesor, menurut BBC. Luo, yang mengatakan kepada BBC bahwa gerakan #MeToo di AS memberikan "banyak keberanian" untuk maju, dipuji karena menginspirasi wanita lain untuk berbicara tentang pengalaman mereka. Menurut The New York Times, beberapa bahkan menggambarkan kisahnya sebagai "langkah pertama dalam Long March" melawan serangan seksual di China. Zhou Xiaoxuan, sekarang berusia 27 tahun, adalah salah satu dari beberapa wanita yang mengajukan tuduhan penyerangan seksual pada tahun 2018 setelah gerakan #MeToo pertama kali mendapatkan daya tarik. Menurut The Washington Post, Zhou menerbitkan sebuah esai yang menuduh pembawa acara China Central Television Zhu Jin meraba-raba dan menciumnya secara paksa di ruang ganti ketika dia berusia 23 tahun magang di acaranya. Ketika Zhou melaporkan kasus itu ke polisi Tiongkok, dia diberitahu bahwa maju ke depan dapat merusak citra Zhu dan "menyakiti perasaan orang-orang yang mengaguminya.". Sangat tidak biasa klaim pelecehan seksual diajukan ke pengadilan di China, dan hampir tidak ada media milik negara yang melaporkan kasus Zhou. Dia dilaporkan mencari permintaan maaf secara terbuka dan ganti rugi sebesar \$7.600 dari Zhu, yang telah membantah klaim terhadapnya. Zhou dilaporkan mengatakan kepada AFP sebelum sidang pada 2 Desember. Setelah hari yang panjang di pengadilan, para hakim menunda persidangan dan memutuskan untuk mendengarkan kasus tersebut di hari lain. Tidak jelas apa yang terjadi selanjutnya, tetapi para ahli percaya bahwa pengadilan setuju untuk mendengarkan kasus Zhou sama sekali (Minutaglio, 2020).

Kasus Zhou Xianzi menjadi salah satu yang paling banyak ditonton di China, terlepas dari pendapat tertutup dan sensor online, kasus ini menarik perhatian internasional dan menyalakan gerakan feminis online China. Pendukung menerjang kehadiran polisi yang padat di luar pengadilan untuk muncul dengan dukungan. Tuntutan hukum oleh para terduga pelaku pelecehan jauh melebihi jumlah gugatan yang diajukan oleh para penyintas. Seseorang terhadap siapa tuduhan publik dibuat dapat membawa gugatan pencemaran nama baik terhadap penuduh. Pengadilan, tanpa dasar hukum yang konkrit, seringkali membalikkan beban pembuktian dalam kasus pencemaran nama baik, memberikan keuntungan yang substansial bagi penggugat. Seorang karyawan yang dipecat karena pelecehan seksual dapat mengajukan pengaduan terhadap perusahaannya karena pemutusan hubungan kerja secara tidak sah. Aturan hukum yang ramah karyawan menempatkan beban pembuktian pada majikan dalam kasus pemutusan hubungan kerja yang melanggar hukum, sekali lagi menguntungkan penggugat. Ini mungkin mengapa perusahaan dalam kasus Shanghai tidak memecat pelaku, meskipun ada dokumentasi dari perilaku pelecehan yang berkelanjutan dan mengganggu terhadap rekannya. Sampai saat ini, tidak ada majikan yang bertanggungjawab di China karena tidak menanggapi pelecehan seksual dengan tepat di tempat kerja mereka — tetapi banyak perusahaan harus



membayar kompensasi untuk pemutusan hubungan kerja secara ilegal karena pengadilan menemukan bukti pelecehan yang tidak cukup. Perusahaan memiliki lebih banyak alasan untuk takut mendisiplinkan karyawan terlalu keras daripada terlalu lembut (Longarino, 2021).

#### 4.5 Implikasi Gerakan #MeToo di China

Sebelum #MeToo masuk di China, China tidak memiliki sistem hukum yang siap untuk menangani kejahatan penyerangan seksual, dan pelecehan seksual bahkan lebih sulit untuk dicegah dan dihukum karena ambiguitas undang-undang yang menentanginya. Undang-undang tersebut tidak memiliki definisi pelecehan seksual atau pedoman tentang cara menuntut kejahatannya. Gerakan #MeToo, termasuk para wanita pemberani yang telah pergi ke pengadilan, dan debut KUH Perdata telah menghidupkan kembali diskusi tentang pelecehan seksual di China. Setelah gerakan #MeToo di China memobilisasi lembaga pemerintah dan LSM di kota, China saat ini sedang bekerja menuju kesetaraan, karenanya China juga memiliki Kepala Eksekutif perempuan, adanya *Women's Protection Law*, dan masih ada langkah kecil untuk menciptakan tempat kerja bagi perempuan yang aman dan di mana mereka tidak dibayar lebih rendah dari rekan laki-laki mereka (Halegua, 2018). Tidak hanya itu, badan pembuat undang-undang China pada Desember 2021 telah mendiskusikan undang-undang untuk memberi perempuan lebih banyak perlindungan terhadap diskriminasi gender dan pelecehan seksual di tempat kerja, media pemerintah melaporkan, menguraikan aturan termasuk definisi yang lebih jelas tentang perilaku yang tidak pantas. Komite tetap parlemen di China, Kongres Rakyat Nasional, membahas rancangan amandemen "Hukum Perlindungan Hak dan Kepentingan Perempuan,". Langkah itu dilakukan setelah adanya seruan aktivis untuk kesetaraan gender yang menyertai gerakan #MeToo dan pada akhirnya lahir serta menjadi gerakan perlawanan yang dimiliki oleh perempuan-perempuan di China.

China berada di peringkat 107 di antara 153 negara dalam peringkat tahunan Forum Ekonomi Dunia tentang kesetaraan gender global. Laki-laki mendominasi eselon atas politik dan bisnis. Perempuan membentuk kira-kira seperempat dari parlemen dan hanya ada satu perempuan di 25 anggota Politbiro Partai Komunis Tiongkok. Di bawah aturan baru, atasan tidak akan diizinkan untuk meminta pelamar kerja perempuan jika mereka berniat untuk menikah atau hamil, atau untuk membuat mereka melakukan tes kehamilan, menurut CCTV. CCTV adalah bagian dari departemen publisitas pemerintah China dan merupakan saluran resmi di mana partai dan pemerintah merilis informasi. Tidak hanya itu, di bawah aturan baru, pengusaha akan melanggar hukum jika mereka membatasi staf perempuan untuk menikah atau memiliki anak, atau jika mereka secara eksplisit memprioritaskan kandidat laki-laki daripada perempuan. Dalam definisi yang paling jelas tentang pelecehan seksual di China, rancangan amandemen menetapkan bahwa adalah melanggar hukum untuk menundukkan perempuan di luar kehendak mereka untuk ekspresi verbal dengan konotasi seksual, perilaku tubuh yang tidak pantas atau tidak perlu, gambar seksual eksplisit, atau perilaku-perilaku tertentu yang tertuju kepada seks (Lun Tian, 2021).

China juga akan mengamandemen Undang-Undang tentang Perlindungan Hak dan Kepentingan Perempuan, yang didefinisikan sebagai "diskriminasi terhadap perempuan" untuk pertama kalinya, dan juga melarang tindakan pengendalian pikiran terhadap perempuan, menetapkan bahwa apa yang disebut sekolah moral perempuan dan Gerakan PUA (pick-up artist), termasuk eufemisme untuk pengendali pikiran, cuci otak, dan penindasan, adalah ilegal. Karena perempuan masih menjadi korban utama pelecehan seksual, KUH Perdata pertama China, yang mulai berlaku pada 1 Januari 2022, membuat ketentuan prinsip untuk pelecehan seksual. Namun mengingat sulitnya mengidentifikasi pelecehan seksual dalam praktiknya, draf tersebut menjelaskan bentuk-bentuk utama pelecehan seksual, yang akan lebih direktif dan praktis. Menurut draf tersebut, pelecehan seksual terhadap perempuan akan dilarang dengan cara yang melibatkan kata-kata berkonotasi seksual atau sindiran; perilaku fisik yang tidak pantas dan tidak perlu; menampilkan atau menyebarkan gambar, teks, informasi, audio, atau video dengan makna seksual yang jelas; atau tindakan yang menyiratkan bahwa akan ada manfaat dalam mengembangkan hubungan pribadi atau seksual. Draft tersebut mengatur bahwa perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual dapat mengajukan pengaduan ke unit dan otoritas terkait. Unit dan otoritas ini akan segera menangani pengaduan dan memberitahu korban tentang hasilnya secara tertulis. Korban perempuan dapat melaporkan kasusnya ke badan keamanan publik atau mengajukan gugatan perdata di pengadilan rakyat.

Rancangan tersebut menambahkan arti "diskriminasi terhadap perempuan" dan menetapkan bahwa negara harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk secara bertahap meningkatkan perlindungan hak dan kepentingan perempuan, menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap mereka, dan melarang diskriminasi atau pembatasan terhadap penikmatan dan pelaksanaan hak perempuan, hak dan kepentingan mereka. Mengingat langkah saat ini untuk mempromosikan kesetaraan gender, rancangan tersebut menambahkan ketentuan untuk langkah-langkah khusus sementara untuk mempercepat realisasi kesetaraan *de facto* antara laki-laki dan perempuan. Menurut rancangan tersebut, kecuali ditentukan oleh negara, pengusaha tidak boleh melakukan hal-hal berikut dalam proses perekrutan: membatasi perekrutan untuk laki-laki atau memprioritaskan mereka; selain informasi pribadi dasar, melakukan penyelidikan atau penyelidikan lebih lanjut tentang pernikahan pelamar perempuan, status orang tua dan rencana mereka untuk menikah dan melahirkan anak; memasukkan tes kehamilan dalam pemeriksaan kesehatan untuk pekerjaan; memberlakukan pembatasan perkawinan dan melahirkan anak sebagai syarat kerja, atau mengambil tindakan lain untuk menolak mempekerjakan perempuan berdasarkan jenis kelamin atau meningkatkan standar pekerjaan perempuan dengan cara yang berbeda. Rancangan tersebut juga meningkatkan mekanisme penghapusan diskriminasi gender di tempat kerja, yang mencakup mempromosikan kontrak kolektif untuk hak dan kepentingan khusus karyawan perempuan dan membangun sistem pelaporan untuk kesetaraan gender di perusahaan.

Seorang anggota staff senior dari federasi perempuan lokal di Nanchang, Provinsi Jiangxi China Timur mengatakan bahwa kuncinya adalah untuk mempromosikan pengetahuan dan pendidikan tentang hukum dan meningkatkan kesadaran publik dengan cara seperti mengadakan sesi pelatihan, meluncurkan kontes pengetahuan, iklan di platform media sosial dan melalui proyek TV. Anggota staf tersebut

mengatakan bahwa pusat bantuan hukum dan hotline perempuan, serta kelompok hak dan kepentingan perempuan dan anak-anak, yang telah didirikan di banyak daerah di China, berfungsi dengan efektif. Pengamat China menekankan bahwa amandemen itu "dilakukan setelah penindasan pemerintah terhadap gerakan #MeToo," dan mengatakan bahwa perlindungan negara terhadap hak dan kepentingan perempuan telah meningkat. The State Council (Dewan Negara) kabinet China, meluncurkan Garis Besar Pembangunan Perempuan di Tiongkok (2021-30) untuk mempromosikan kesetaraan gender pada September 2021 (Keyue, 2021).

## 5. Kesimpulan

Media sosial memberi kekuatan untuk mengekspresikan topik yang sebelumnya dianggap sangat sulit untuk diartikulasikan. Kekerasan dan pelecehan seksual adalah topik yang menantang untuk dibicarakan, terlepas dari apakah lingkungan terjadinya melalui online atau offline. Pelaku potensial bervariasi dari orang-orang terdekat seperti pasangan, orang tua, atau anggota keluarga lainnya hingga rekan kerja dan pria yang memiliki posisi kuat. Masyarakat dapat merespon dengan banyak cara. Film, acara televisi, acara bincang-bincang, buku, dan media sosial telah mengungkap masalah ini. Keluhan dari penyintas kekerasan seksual pun juga bermacam-macam, dari komentar informal hingga tertulis secara formal. Umumnya, korban diharapkan dan didorong untuk mengikuti proses pengaduan formal, bahkan mungkin dalam format yang ditentukan. Media sosial, sebagai cara baru untuk berkomunikasi, mengungkap besarnya masalah ini melalui gerakan yang disebut Me Too dengan melampirkan tagar #MeToo ke pos yang dibagikan.

Fenomena #MeToo telah membawa banyak manfaat karena beberapa korban merasa kesulitan dalam mengajukan pengaduan. Gerakan #MeToo telah mendorong banyak wanita untuk datang maju. Dapat dikatakan bahwa sarana ini memberikan korban dengan platform untuk berekspresi, mendapatkan dukungan sosial, dan berbagi empati perasaan mereka. Banyak cerita pribadi tentang kemarahan dan rasa bersalah, yang terkubur di bawah keheningan bertahun-tahun, kemudian muncul di media publik karena #MeToo movement ini. Banyak korban telah maju melalui gerakan-gerakan ini yang mungkin merasa tidak memiliki keberdayaan untuk berbicara dan sekarang mulai berbicara menggunakan media sosial untuk berbagi cerita tragis mereka, mendukung dan berdiri dengan satu sama lain, dan mengekspos pelaku-pelaku kekerasan seksual.<sup>1</sup>

Gerakan #MeToo adalah aktivisme independen tentang perempuan yang maju untuk berbicara, menceritakan kisah mereka dan menantang sistem patriarki; yang merasa bahwa hak-hak perempuan dan kesetaraan gender melekat pada mereka. Tapi ide-ide itu sangat mengancam pemerintah China yang ingin menguasai segalanya. Itu sebabnya pemerintah tidak konsisten dalam mengembangkan hak-hak perempuan.

---

<sup>1</sup> Coffey P, Leitenberg H, Henning K, Turner T, Bennett RT. Mediators of the long-term impact of child sexual abuse: perceived stigma, betrayal, powerlessness, and self-blame. *Child abuse Negl.* 1996 May 1;20(5):447-455.

Pada tahun 2015, China menahan lima aktivis atas rencana mereka untuk berunjuk rasa menentang pelecehan seksual di transportasi umum, yang memicu kegemparan internasional. Sebulan kemudian, China membebaskan mereka dengan jaminan. Penahanan dan upaya untuk membungkam aktivisme online mereka, bagaimanapun, tidak menghentikan banyak wanita China untuk memperdebatkan masalah dan memperjuangkan kesetaraan gender. Pencapaian terbesar mengenai hak-hak perempuan di China adalah dari masyarakat sipil, di mana perempuan biasa didorong dan bersedia untuk berbicara menentang ketidaksetaraan gender dan pelecehan seksual, yang mana hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya ledakan dukungan untuk hak-hak perempuan ini secara online melalui #MeToo. Pada akhirnya, #MeToo telah memberikan implikasi positif yang signifikan terhadap perempuan-perempuan di China.

## REFERENSI

### Buku

- McLuhan, Marshal. 2003 "Technology Determinism", In *A First Look at Communication Theory*, Fifth Edition, by EM Griffin, New York, McGraw Hill.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya. 2013.
- Soekidjo Notoatmodjo, *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005, p. 19.

### Artikel Dalam Buku

- Castells, 2004. *The Network Society a Cross-cultural Perspective*, dalam "Perempuan Dan Teknologi Informasi Dalam Perspektif Cyberfeminist", oleh Suharnik.
- Coffey P, Leitenberg H, Henning K, Turner T, Bennett RT. Mediators of the long-term impact of child sexual abuse: perceived stigma, betrayal, powerlessness, and self-blame. *Child Abuse Negl*. 1996 May 1;20(5):447-455.

### Artikel Dalam Jurnal

- #MeToo as Connective Action: A Study of the Anti-Sexual Violence and Anti-Sexual Harassment Campaign on Chinese Social Media in 2018. Oleh Jing Zeng. *Journalism Practice*, Routledge Taylor & Francis Group. Volume 14, 2020 – Issue 2: Journalism and Sexual Violence.
- Annie Cossins, *The Emerald Handbook of Feminism, Criminology and Social Change*, p. 69–94
- Bhattacharyya, R. 2018. # Metoo movement: an awareness campaign, *International Journal of Creativity and Change*, 3(4), 1–12.
- Hamidah, Lisa Noor. *Teknologi dan Tubuh Perempuan*. Jurnal Perempuan No. 18 tahun 2001.
- Hawthorne, Susan and Renate Klein, "CyberFeminism: Connectivity, Critique and Creativity". Pada tahun 1999. Web: Renate Klein, Susan Hawthorne - *Cyberfeminism\_ Connectivity, Critique and Creativity*-Spinifex Press (2003).pdf
- Heise, L., 2011. *What Works to Prevent Partner Violence? An Evidence Overview*. London: STRIVE Research Consortium, London School of Hygiene and Tropical Medicine.
- Keremoglu, E., & Weidmann, N. B. (2020). How Dictators Control the Internet: A Review Essay. *Comparative Political Studies*, Vol 53 issue (10–11), 1690–1703. SAGE Publication Journals.
- Mulyaningrum, 2015. CYBERFEMINISME: Mengubah Ketidaksetaraan gender melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi, "Conference paper, At: Pusat Kajian Jepang, Kampus Depok - Universitas Indonesia". Hlm. 2-3
- Murphy, Megan. (2019) Introduction to "#MeToo Movement", *Journal of Feminist*.
- Mendes, K., Ringrose, R. and Keller, J. 2018. #Metoo And The Promise And Pitfalls Of Challenging Rape Culture Through Digital Feminist Activism, *European Journal of Women's Studies*, 25(2), 236–



- Plant, S. (1996). "On the Matrix: Cyber-feminism Simulations". In Rob Shields (Ed) *Cultures of the Internet: Virtual Spaces, Real Histories, Living Bodies*. London: Sage Publications.
- Zhongxuan Lin & Liu Yang (2019) Individual and collective empowerment: Women's voices in the #MeToo movement in China, *Asian Journal of Women's Studies*, 25:1, 117-131.

### Artikel Dari Internet

- BBC. (2018). China professor accused in #MeToo campaign is sacked. BBC News. Retrieved from <https://www.bbc.com/news/world-asia-china-42659827> diakses pada 8 Februari 2022.
- Gathecole Lam, Nuala. 2019. "Beyond #MeToo in China: A Conversation with Zhang Leilei", Retrieved from <https://madeinchinajournal.com/2019/04/18/me-too-in-china-zhang-leilei/> diakses pada 22 Juni 2022.
- Halegua, Aaron. 2018. ChinaFile Conversation, "The Significance of China's #MeToo Movement", retrieved from <https://www.chinafile.com/conversation/what-significance-of-chinas-metoo-movement> diakses pada 23 Juni 2022.
- Johnson, C. 2018. Valerie Jarrett talks #MeToo and women running for office at U. of . event: 'It's just the beginning', *Chicago Tribune*, 2 November, n.p. Available at: <https://www.chicagotribune.com/lifestyles/ct-life-law-era-of-me-too-univ-chicago1102-story.html> diakses pada 22 Juni 2022.
- Keyue, Xu. 2021. *Global Times : China Society*, "China To Amend Law On Protection Of Women's Rights And Interests, To Define Meaning Of Female Discrimination For 1st Time, Ban Mind Control Acts", retrieved from <https://www.globaltimes.cn/page/202112/1242977.shtml> diakses pada 23 Juni 2022.
- Longarino, Darius. 2021. *The Washington Post*. "A woman won a landmark #MeToo case in China. Why is winning so hard?". Retrieved from <https://www.washingtonpost.com/politics/2021/03/20/once-woman-won-metoo-case-china-why-is-it-so-hard/> diakses pada 22 Juni 2022.
- Minutaglio, Rose. 2020. Sexual Assault Survivors In China Are Speaking Out. Is Anyone Listening? Inside the country's fledgling #MeToo movement. Retrieved from <https://www.elle.com/culture/career-politics/a34908442/zhou-xiaoxuan-china-metoo-movement/> diakses pada 22 Juni 2022.
- Mu, C. (2018). China's sudden #MeToo movement. *The Diplomat*. Retrieved from <https://thediplomat.com/2018/07/chinas-sudden-metoo-movement/> diakses pada 8 Februari 2022.
- Ricardo, H. et al., 2010. *The Global Gender Gap Report*. Geneva: World Economic Forum. Retrieved from <https://members.weforum.org/pdf/gendergap/report2010.pdf> diakses pada 24 Juni 2022.
- Serjerant, Jill. 2020. "After Weinstein, #MeToo themes in film, TV reflect wider cultural reckoning", *Reuters*. Retrieved from <https://www.reuters.com/article/us-people-harvey-weinstein-culture-idUSKBN20Z1AG> diakses pada 28 Februari 2022.
- Tian, Yew Lun. 2021. "China prepares new sexual harassment safeguards for women," *Reuters*. Retrieved from <https://www.reuters.com/world/china/china-prepares-new-sexual-harassment-safeguards-women-2021-12-20/> diakses pada 23 Juni 2022.
- Turkington, Rebecca. on June 1, 2022 in *Global Feminisms, Histories of the Present*. Retrieved from <https://www.historyworkshop.org.uk/metoo-in-china/> diakses pada 22 Juni 2022.

### Skripsi/Tesis/Disertasi

- Valiente, Celia. (2015). *Social Movements in Abeyance in Non-Democracies: The Women's Movement in Franco's Spain*. *Research in Social Movements, Conflicts and Change (Research in Social Movements, Conflicts and Change, v. 38)*. Bingley: Emerald Group Publishing. Pp. 259-290.
- Xiong, Y., Cho, M., & Boatwright, B. (2019). *Hashtag Activism And Message Frames Among Social Movement Organizations: Semantic Network Analysis And Thematic Analysis Of Twitter During The #Metoo Movement*. *Public Relations Review*.

# **LAMPIRAN**

Uji Turnitin

# Naspub 1 : ANALISIS GERAKAN #MeToo SEBAGAI PERLAWANAN KEKERASAN DAN PELECEHAN SEKSUAL BAGI PEREMPUAN DI CHINA

*by Nazariana Nazariana*

---

**Submission date:** 10-Oct-2022 01:00PM (UTC+0800)

**Submission ID:** 1921323800

**File name:** Naskah\_Publikasi\_Autosavedddd\_1.docx (146.51K)

**Word count:** 8128

**Character count:** 54484

# Naspub 1 : ANALISIS GERAKAN #MeToo SEBAGAI PERLAWANAN KEKERASAN DAN PELECEHAN SEKSUAL BAGI PEREMPUAN DI CHINA

## ORIGINALITY REPORT



## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://www.researchgate.net">www.researchgate.net</a> Internet Source	6%
2	<a href="http://not2fast.com">not2fast.com</a> Internet Source	2%
3	<a href="http://journal.uwks.ac.id">journal.uwks.ac.id</a> Internet Source	1%
4	<a href="http://core.ac.uk">core.ac.uk</a> Internet Source	1%
5	<a href="http://www.globaltimes.cn">www.globaltimes.cn</a> Internet Source	1%
6	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	1%
7	<a href="http://eprints.umm.ac.id">eprints.umm.ac.id</a> Internet Source	1%
8	Annie Cossins. "Feminist Criminology in a Time of 'Digital Feminism': Can the #MeToo	<1%